

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh perusahaan yang telah *go public* dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib untuk memenuhi kewajibannya dalam hal menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 1 (revisi 2017), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu poin terpenting dalam laporan keuangan yang dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan adalah laba (Mentari, 2020). Informasi laba didapatkan melalui laporan laba rugi atau *income statement*. Laporan laba rugi atau *income statement* merupakan salah satu fokus utama untuk para pengguna laporan keuangan. Penilaian atas kinerja yang dijalankan perusahaan tercermin dari perolehan laba atau rugi yang didapat dalam periode tersebut (Anggraeni & Adiwijaya, 2020). Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan, karena manajemen dianggap dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan efektif dan efisien, sehingga hal tersebut menjadi perhatian bagi pihak investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan yang mengalami peningkatan laba yang signifikan dari tahun ke tahun.

Penilaian atas kinerja manajemen melalui informasi laba dapat memotivasi manajemen untuk mencapai target laba yang ditentukan. Apabila pada suatu kondisi

tertentu manajemen tidak berhasil mencapai target laba tersebut, maka manajemen cenderung memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, untuk mengatur informasi laba yang akan dilaporkan. Menurut Christiantie & Christiawan (2013) informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistis manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba dapat diatur, dinaikkan, diturunkan sesuai keinginannya. Praktik tersebut dikenal sebagai manajemen laba.

Manajemen laba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan dan sering mendapatkan kritik dari beberapa kalangan peneliti selama beberapa dekade terakhir (Nalarreason et al., 2019). Indra Kusumawardhani, (2012) menyebutkan bahwa manajemen laba tidak selalu merugikan apabila dilakukan dalam koridor peluang akuntansi. Dapat dikatakan manajemen laba tidak memanipulasi angka pada laporan keuangan karena tersedia alternatif untuk menggunakan beberapa metode dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan Subramanyam dalam Yunietha & Palupi (2017) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan intervensi yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen dalam menetapkan laba untuk kepentingan pribadi. Praktik manajemen laba tersebut sering dinilai sebagai kegiatan yang negatif, karena praktik tersebut menyebabkan informasi-informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan lagi untuk menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Praktik manajemen laba terindikasi muncul sebagai dampak dari masalah keagenan (Mayasari et al., 2019). Dimana masalah tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan pihak manajemen perusahaan (*agent*), yang mana masing-masing pihak berusaha untuk mempertahankan atau mencapai tingkat kemakmuran yang dituju. Pada umumnya pihak *agent* berkepentingan untuk memaksimalkan kompensasi kontrak, memperoleh investasi, pinjaman dan memperoleh keuntungan yang maksimal dalam bekerja. Sedangkan *principal* memiliki kepentingan untuk meraih profit yang maksimal, berharap untuk mendapatkan tingkat pengembalian saham yang maksimal juga, oleh sebab itu fokus *principal* dalam informasi laba sering tidak memperhatikan metode, *judgment*, dan prosedur yang digunakan oleh pihak manajemen untuk menghasilkan laba tersebut. Hal ini menjadi celah bagi pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

Terdapat beberapa pihak yang menyatakan bahwa selama perusahaan tetap menggunakan metode akuntansi yang berlaku umum, maka wajar untuk menerapkan manajemen laba. Namun, dari perspektif investor dan pemegang saham, pendekatan praktik manajemen laba ini tentu dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Praktik manajemen laba ini telah memunculkan dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain kasus Enron, WorldCom, dan Xerox. Tidak hanya di negara maju, namun negara berkembang seperti Indonesia juga terjadi praktik manajemen laba. Adapun perusahaan di Indonesia yang terjerat kasus manajemen laba yang terbaru terjadi pada

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah merekayasa laporan keuangan tahun 2017 dengan menggelembungkan laba bersih perusahaan dan menyebabkan harga saham melonjak. Berdasarkan analisa perbandingan laporan keuangan tahun 2017 yang diungkapkan dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta Ernst & Young (EY) pada tanggal 12 Maret 2019 sebelumnya, terdapat penggelembungan yang terjadi pada akun asset tetap, piutang usaha, persediaan dan dugaan lainnya senilai Rp 4 triliun (finance.detik.com, 2021). Selain itu terdapat temuan lain yaitu penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lainnya senilai Rp 329 miliar pada *earning before interest, taxes, depreciation, and amortization* (EBITDA). Dari laporan hasil investigasi EY ditemukan juga perbedaan pencatatan keuangan data internal dengan pencatatan auditor keuangan yang digunakan dalam proses mengaudit laporan keuangan 2017. Tindakan tersebut membenarkan dugaan EY, bahwa adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen lama PT Tiga Pilar Sejahtera, karena telah merubah kandungan informasi atas laporan keuangan yang disajikan perusahaan demi kepentingan tertentu. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tersebut awalnya untuk menjaga nilai perusahaan agar tidak jatuh di mata investor namun berbanding terbalik dengan kenyataannya yang sebenarnya bahwa perusahaan mengalami penurunan nilai yang signifikan.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera tersebut, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didukung oleh BEI untuk

mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Adapun aturan tersebut ditujukan bagi para petinggi perusahaan yang tindakannya dapat memberikan kerugian bagi perusahaan maupun investor. Menurut direktur utama BEI Inarno Djajadi dengan adanya peraturan tersebut dapat meningkatkan aspek tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) bagi perusahaan, untuk melindungi investor yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen (finance.detik.com, 2021). Dalam hal ini pemerintah akan terus mendorong dengan penerapan *good corporate governance*, terlebih untuk mendorong ekosistem bisnis yang bersih, efektif, dan efisien saat pandemi serta bermanfaat bagi ekonomi nasional. Fenomena pandemi covid-19 yang merebak di Indonesia sejak awal Maret 2020, mengakibatkan krisis perekonomian dan membuat praktik bisnis terganggu dalam situasi tersebut. Dimana dalam kondisi ini membuat perusahaan harus semakin akurat dalam menentukan bagaimana kebijakan keuangan serta strategi bisnis yang efektif dan efisien demi kelangsungan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Ardiansyah (2020) serta Azizah (2021) menunjukkan hasil bahwa perusahaan selama pandemi covid tetap melakukan praktik manajemen laba. Dimana dimasa pandemi covid ini perusahaan lebih ringan melakukan praktik manajemen laba dengan alasan supaya tidak ingin terlihat jelas pada saat kondisi tersebut. Perusahaan melakukan praktik manajemen laba semasa pandemi covid ini, ingin menunjukkan kinerja perusahaan yang dinilai baik dimata investor sehingga menarik dan tidak kehilangan investor yang sudah ada. PT KAEF dalam hal ini yang mendapat tugas

terkait penyediaan vaksin dilaporkan bahwa perusahaan ini menurunkan tingkat manajemen laba akrual pada saat pandemi namun tetap mencatat kenaikan labanya. Selain itu, PT KLBF yang belum mendapat tugas terkait penyediaan vaksin tetap mencatat kenaikan laba dan secara bersamaan dengan tingkat manajemen laba. (Firmansyah & Ardiansyah, 2020). Oleh karena itu, dengan semakin efektifnya penerapan GCG di Indonesia membuat bisnis perusahaan akan tetap aman dan tumbuh dengan baik, dan menimbulkan kepercayaan masyarakat serta investor baik dari dalam maupun luar negeri yang akan terus meningkat. Selain itu, upaya yang dilakukan ini guna mengatasi kelemahan tata kelola yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1

Market Category Scores Good Corporate Governance in Asia Pasific 2020

CG Watch 2020 market rankings and scores		
Market	Total (%)	Macro market highlights
1. Australia	74.7	Banking commission spurs enforcement, still no federal ICAC
=2. Hong Kong	63.5	New audit regulator, enforcement remains strong, ICAC disappoints
=2. Singapore	63.2	Enforcement firming, rules improve, company disclosure disappoints
4. Taiwan	62.2	Big CG reform push on multiple fronts, rules still complicated
=5. Malaysia	59.5	Political turmoil erodes government scores, other areas hold steady
=5. Japan	59.3	Ahead on climate change reporting, behind on company CG disclosure
7. India	58.2	New audit regulator, civil society surges, public governance disappoints
8. Thailand	56.6	Political turmoil erodes government scores, rules strong, investors improve
9. Korea	52.9	Public governance strengthens, CG disclosure improves, regulatory opacity
10. China	43.0	Forging its own governance path, still waiting for ESG reporting guidelines
11. Philippines	39.0	Stronger regulatory focus on CG, investors and civil society disappoint
12. Indonesia	33.6	CG reform continues to struggle, some stronger rules, new e-voting system

Sumber: Asian Corporate Governance Association, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, merupakan hasil survey yang telah dilakukan oleh *Asian Corporate Governance Association (ACGA)* pada tahun 2020 dengan jumlah sampel 12 negara perilaku bisnis yang ada di Asia Pasific, yang menyatakan bahwa

Indonesia menunjukkan urutan ke 12 dengan hasil rata-rata nilainya 33,6% apabila dibandingkan dengan 11 negara lainnya dalam menerapkan *corporate governance*.

Tabel 1.2

Market Scores by Category 2020

Market scores by category, 2020													
(%)	AU	CH	HK	IN	ID	JP	KR	MY	PH	SG	TW	TH	Regional average
1. Government & public governance	68	29	65	45	31	60	60	32	28	60	68	35	48
2. Regulators	65	52	69	53	24	62	53	53	27	63	66	51	53
- Funding, capacity, reform	62	42	62	51	31	58	45	53	27	56	62	47	50
- Enforcement	68	64	76	56	16	66	62	54	26	70	70	56	57
3. CG rules	82	63	75	69	35	58	56	77	45	75	66	76	65
4. Listed companies	79	51	59	65	38	44	48	66	55	60	63	60	57
5. Investors	66	18	34	44	19	60	44	43	21	39	38	38	39
6. Auditors & audit regulators	86	43	81	54	59	77	70	86	60	81	76	76	71
7. Civil society & media	80	22	60	78	38	62	36	44	36	64	62	49	53
Total	74.7	43.0	63.5	58.2	33.6	59.3	52.9	59.5	39.0	63.2	62.2	56.6	55

Sumber: Asian Corporate Governance Association, 2020

Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki nilai rata-rata 33.6% yang berasal dari *market scores* 2020 berdasarkan 7 kategori, antara lain sebagai berikut: 1) *Governance & Public Governance*, dimana dalam tabel tersebut Indonesia menunjukkan nilai *scores* 31% lebih unggul dibandingkan dengan negara China dan Philipina. ACGA menyatakan bahwa penilaian *score* pada survey berdasarkan beberapa alasan yaitu, dukungan politik, dana pemerintah, dan peningkatan atas GCG bank. 2) *Regulators*, dimana dalam tabel tersebut Indonesia menunjukkan nilai rata-rata *scores* paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya yaitu 24%, hal tersebut

disebabkan karena Indonesia mengungkapkan lebih sedikit informasi mengenai anggaran dan sumber dayanya dibandingkan negara lain yang selalu menjawab pertanyaan dengan baik terkait hal tersebut (ACGA, 2020). 3) *CG Rules*, dimana dalam tabel tersebut Indonesia menunjukkan nilai 35% paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Dalam kategori ini, ACGA menilai berdasarkan tidak dilakukan berdasarkan aturan tetapi lebih pada dasar aturan itu sendiri. 4) *Listed Company*, dimana dalam tabel tersebut Indonesia menunjukkan nilai 38% paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Dalam kategori ini ACGA melakukan penilaian bersama *Asia Research & Engagement (ARE)* berdasarkan laporan perusahaan terkait *key financial metrics, governance and ESG/sustainability*, serta pengungkapan praktik dewan seperti pelatihan, evaluasi dewan, kebijakan remunerasi, dan lain sebagainya. 5) *Investors*, dalam tabel tersebut Indonesia menunjukkan nilai 19% lebih unggul dibandingkan negara china yang menunjukkan nilai 18%. Menurut ACGA, dalam kategori ini penilaian peningkatan *scores* berdasarkan keterbukaan informasi atau transparansi baik perusahaan local maupun asing yang terdapat pada negara tersebut. 6) *Auditors and Auditors Regulators*, dimana dalam tabel tersebut Indonesia menunjukkan nilai 59% lebih unggul dibandingkan dengan negara lain yaitu India dan China. Dalam kategori ini ACGA menilai berdasarkan apakah negara yang bersangkutan telah mengikuti standart akuntansi internasional atau paling tidak ikut menjadi anggota pada badan akuntansi internasional dan apakah negara yang bersangkutan menciptakan ruang lebih luas untuk badan atau akuntan yang independen. 7) *Civil society and media*, dimana dalam tabel tersebut Indonesia

menunjukkan nilai 38% lebih unggul dibandingkan dengan negara lain yaitu Philipina, Korea, dan China. Menurut ACGA penilaian terkait peningkatan *scores* tersebut berdasarkan pemberian ruang lebih untuk perusahaan non profit, institusi professional yang mapan, serta kebebasan media dalam mempromosikan CG dan ESG, seperti dengan melakukan pelatihan atau lain sebagainya.

Perdana (2012) menyatakan bahwa dengan menerapkan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan dapat mengurangi atau mencegah manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Menurut Watts & Zimmerman dalam (Mayasari et al., 2019) penerapan *good corporate governance* sebagai salah satu cara untuk memantau masalah kontrak dan mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Ada beberapa indikator yang dapat mengarah pada mekanisme *good corporate governance* untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, antara lain dengan 1) memperbesar jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan atau disebut dengan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) (Jensen & Mecling, 1976), 2) Terdapatnya kepemilikan institusional, dianggap sebagai investor berpengalaman (*sophisticated investor*) dengan proporsi kepemilikan yang cukup besar, dan dapat mengawasi pengelolaan, yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba (Pratana and Machfoedz dalam Siregar, 2017), 3) Proporsi dewan komisaris independen yang dapat membatasi pihak-pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba (Pope et al., 1998), 4) Keberadaan komite audit dipercaya dapat mengurangi aktivitas manajemen laba, yang dan dapat

mempengaruhi kualitas pada pelaporan keuangan, termasuk kualitas laba (Wilopo dalam Siregar, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari et al., (2019) pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sejalan dengan penelitian Siregar (2017), dan Hendra et al., (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengurangi manajemen laba. Menurut Yang et al., (2009) hal ini disebabkan karena pihak investor institusional tidak berperan sebagai investor yang berpengalaman yang memiliki banyak kemampuan serta kesempatan untuk mengawasi dan mendisiplinkan manajer agar lebih fokus pada nilai perusahaan, serta membatasi kebijakan manajemen dalam melakukan manajemen laba, melainkan berperan sebagai pemilik sementara yang lebih terfokus pada *current earnings*. Berbeda dengan hasil penelitian Octavia (2017) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan hasil penelitian Roskha et al., (2017), Astari (2017) dan Fairus & Sihombing (2020), yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Proksi lainnya seperti kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan Octavia (2017), dan Roskha et al., (2017) namun tidak sejalan dengan penelitian, Siregar (2017), Astari (2017), Arthawan & Wirasedana (2018) dan Fairus & Sihombing (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, hal ini berarti

semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah praktik manajemen labanya. Dengan adanya kepemilikan manajerial membuktikan bahwa kepemilikan manajerial mampu untuk membatasi manajer melakukan manajemen laba dengan menyelaraskan tujuan *agent* dengan tujuan *principal* maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin efektif dan membuat manajer untuk lebih berhati-hati dalam melakukan praktik manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Yunietha & Palupi (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan penelitian Siregar (2017) pengaruh *good corporate governance* dapat diukur dengan menggunakan proksi lain seperti dewan komisaris independen, dan komite audit. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, penelitian ini sejalan dengan penelitian Roskha et al., (2017), dan Yunietha & Palupi, (2017), sehingga dapat dikatakan bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris tidak dapat menjadi faktor utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan melainkan tergantung pada efektivitas pengendalian melalui norma, nilai, dan kepercayaan yang dapat diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan komisaris dalam aktivitas monitoring terhadap pihak manajemen. (Jennings dalam Siregar, 2017). Berbeda dengan hasil penelitian Hendra et al., (2018) yang menyatakan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan penelitian Octavia (2017) dan Fairus & Sihombing (2020) yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Selain itu variabel komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba, penelitian ini sejalan dengan penelitian Roskha et al., (2017), namun berbeda dengan hasil penelitian Octavia (2017) dan Fairus & Sihombing (2020) yang menunjukkan hasil penelitian berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, hal ini berarti keberadaan komite audit di perusahaan dapat mengurangi praktik manajemen laba. Keberadaan komite audit di dalam perusahaan dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perusahaan, yaitu mengawasi tindakan oportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba, selain itu fungsi komite audit dalam *good corporate governance* lainnya memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjalankan bisnisnya dengan tepat, dan secara efektif mengendalikan konflik kepentingan sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk meningkatkan kepercayaan investor atas informasi laba perusahaan yang disampaikan.

Untuk lebih menjelaskan bagaimana hubungan antara proksi-proksi *good corporate governance* terhadap manajemen laba, maka penelitian ini menggunakan variabel *leverage* dan *firm size* sebagai variabel kontrol. *Leverage* dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol, sebab beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan positif antara *leverage* dan manajemen laba. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, artinya semakin tinggi utang perusahaan maka perusahaan akan semakin besar kemungkinan untuk melanggar perjanjian. Kondisi tersebut mendorong manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba yang dapat meningkatkan labanya dengan

menggunakan metode akuntansi yang berlaku umum. Selain itu alasan *firm size* sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini, sebab beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya *firm size* diyakini dapat menurunkan praktik manajemen laba, semakin besar perusahaan tersebut maka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki tekanan yang kuat dari para *stakeholdernya* untuk menampilkan kinerja perusahaan sesuai harapan para investor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mayasari et al., (2019) yang berjudul “*The Influence Of Corporate Governance, Company Size, And Leverage Toward Earning Management*” dengan menguji variabel-variabel seperti, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan proksi untuk variabel *good corporate governance* yaitu dewan komisaris independen dan komite audit yang berasal dari penelitian Al-Thuneibat et al. (2016), Siregar (2017), Octavia (2017), Roskha et al., (2017), Yunietha & Palupi (2017), Hendra et al. (2018), dan Fairus & Sihombing (2020).
2. Penelitian ini menggunakan *leverage* dan *firm size* sebagai variabel kontrol.
3. Penelitian ini menambahkan variabel dummy periode sebelum dan semasa pandemi covid-19.

4. Penelitian ini menggunakan periode tahun penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu tahun 2016-2020, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari et al., (2019) menggunakan tahun penelitian 2015-2017;
5. Pada penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari et al., (2019) menggunakan sampel perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar pada BEI.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Sebelum Covid Dan Semasa Pandemi Covid.”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Sampai saat ini masih sering terjadi kasus manajemen laba baik di negara berkembang maupun di negara maju yang terjadi didalam perusahaan.
2. Berdasarkan hasil report *Asian Corporate Governance Association (ACGA)* pada tahun 2020 dengan jumlah sampel 12 negara perilaku bisnis yang ada di Asia Pasific, menyatakan bahwa Indonesia menunjukkan urutan ke 12 dengan

hasil rata-rata nilainya 33,6% apabila dibandingkan dengan 11 negara lainnya dalam menerapkan *corporate governance*.

3. Terdapat perbedaan hasil pada penelitian Al-Thuneibat et al. (2016), Octavia (2017), Roskha et al., (2017), Astari (2017), Siregar (2017), Yunietha & Palupi (2017), Arthawan & Wirasedana (2018), Hendra et al., (2018), Suryani, (2018), Mayasari et al., (2019), Nalarreason et al., (2019), dan Fairus & Sihombing (2020), yang mengukur hubungan antara *good corporate governance* terhadap manajemen laba.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* yang terdapat dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
5. Apakah pandemi covid-19 berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat banyaknya faktor yang diduga dapat mempengaruhi manajemen laba, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada variabel *good corporate governance* yang diprosikan hanya variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.
2. Terdapat berbagai macam model untuk mengukur manajemen laba, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan model Kothari. Pengukuran ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kothari et al., (2005).
3. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam BEI pada periode penelitian yaitu dari tahun 2016-2020. Alasan memilih perusahaan tersebut disebabkan karena saham perusahaan manufaktur lebih diminati investor dibandingkan perusahaan lain. Dalam pernyataan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama

5 tahun terakhir (2015 – Triwulan I 2020) realisasi investasi di sektor manufaktur mencapai Rp1.348,9 triliun. Sektor utama yang paling diminati dan menjanjikan adalah industri makanan yang investasinya mencapai Rp293,2 triliun dengan persentase total investasi sebanyak 21,7% (economy.okezone.com, 2020). Hal tersebut membuat perusahaan manufaktur dituntut semakin efektif dalam mempublikasikan laporan keuangannya dimana pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan dalam hal tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris terkait hal-hal berikut:

1. Mengetahui dan menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
2. Mengetahui dan menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
3. Mengetahui dan menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
4. Mengetahui dan menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

5. Mengetahui dan menguji pengaruh pandemi covid-19 terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen perusahaan manufaktur untuk menentukan tindakan yang tepat mengenai manajemen laba, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan terbebas dari kecurangan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi, menilai kinerja manajemen perusahaan dan mengevaluasi struktur kepemilikan pada manajemen laba.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi literatur di bidang keuangan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding dalam penelitian selanjutnya yang mengambil topik manajemen laba.

5. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing menjelaskan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, pembatasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mencakup segala konsep, teori dari berbagai literatur yang mendasari penelitian, hasil penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil penelitian lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan bentuk penelitian, objek penelitian, defnisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengambilan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V PENUTUPAN

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

